

BAB VI

SARAN

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Libra dilakukan selama 5 minggu, mulai tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019, beberapa saran:

1. Mahasiswa calon apoteker perlu lebih meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi saat memberikan informasi kepada pasien sehingga pasien dapat mengerti tentang informasi yang disampaikan.
2. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya lebih membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, undang-undang kefarmasian terbaru, manajemen apotek dan mengetahui secara garis besar efek terapi obat agar lebih siap dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek.
3. Mahasiswa calon apoteker harus aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA di apotek agar mendapatkan informasi yang optimal sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengelola apotek.
4. Mahasiswa calon apoteker sebaiknya terus mau belajar agar pengetahuan yang didapatkan dapat diterapkan di apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *MIMS Indonesia Petunjuk Konsultasi*, ed. 18, 2018, PT.Medidata Indonesia, Jakarta.
- BNF, 2018, *British National Formulary 76th Edition*, BMJ Publishin Groub, London
- BNF Children, 2018, *British National Formulary for Children*, BMJ Publishin Groub, London
- McEvoy, G.K., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1993, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 919 Tahun 1993 tentang Kriteria Obat yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Berita Acara Pemeriksaan Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 Tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktek, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Presiden Republik Indonesia, Jakarta.
- Sweetman, S. C., 2009, *Martindale The Complete Drug Reference*, ed 36th, The Pharmaceutical Press, London.